

# Dewan Minta Evaluasi Simantri

Evaluasi itu untuk mengatasi unit Simantri yang gagal yang ada di kabupaten/kota.

DENPASAR, NusaBali

Pansus LKPJ DPRD Bali memutuskan ada evaluasi terhadap program Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri). Terutama hal-hal mendasar tentang penanganan program Simantri yang gagal.

Soal Simantri ini dibahas dalam laporan internal Pansus LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) DPRD Bali, Selasa (28/4) siang, di gedung DPRD Bali. Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry itu sedikit terjadi ketegangan. Hal ini diawali Ketua Pansus LKPJ Disel Astawa mengusulkan adanya pembentukan pilot project Simantri di masing-masing kabupaten dan kota. Pilot project

dimaksudkan untuk memacu kelompok Simantri lainnya di kabupaten dan kota untuk mengikuti percontohan yang sudah ada, sehingga kegagalan bisa dicegah.

"Dengan pilot project ini nanti menjadi acuan bagi kelompok Simantri lain. Artinya mereka punya metode, acuan untuk melaksanakan program tersebut," ujar Disel Astawa.

Pandangan Disel Astawa ini dimentahkan anggota Pansus dari Fraksi Golkar Ketut Suania. Politisi asal Dapil Jembrana ini mengatakan tak sependapat pilot project dibangun di kabupaten dan kota buat mengatasi persoalan Simantri yang dilaporkan gagal. "Simantri memang ada yang belum berhasil, tetapi saya lebih setuju kalau hubungan sinergis kabupaten/kota dengan Provinsi Bali yang diperbaiki, sehingga berdampak pada program-program pemerintah provinsi yang dibuat di kabupaten. Selama ini hubungan dengan kabupaten tidak sinergis sehingga program terganggu," tandas Suania.

Pernyataan Suania ini didu-

kung anggota Pansus yang juga Ketua Fraksi Demokrat Wayan Adnyana. Kata Adnyana, satu program ada yang gagal tidak semuanya berarti gagal.

Disel Astawa langsung mematahkan argumen Suania dan Adnyana. Kata politisi PDIP asal Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, ini program Simantri beberapa yang gagal bahkan hendak distop, disampaikan sendiri oleh Gubernur Made Mangku Pastika. "Kan Gubernur Pastika menyampaikan saat rapat gabungan dengan DPRD Bali. Bahkan ada permohonan Simantri 2015 minta ditunda dan Gubernur belum mengeluarkan SK," kata Disel Astawa.

"Ketimbang programnya distop, kami lebih sepatutnya membuat proyek percontohan supaya ada sebuah panduan bagi kelompok lain yang belum berhasil. Bukan atas keinginan dewan menyedot Simantri. Kita di dewan akan mendukung kalau program itu pro rakyat dan benar-benar nyata," imbuh Disel Astawa.

Anggota Pansus Made Ngakan

Edisi : Rabu, 25 April 2015

Hal : 3

## Radar Bali



Sambungan

Samudra juga angkat bicara. Dia meminta supaya program Simantri dievaluasi dulu, sehingga tidak ada kesan langsung mengkerdilkan program tersebut. "Saya tidak setuju satu Simantri di kabupaten dan kota," kata Ngakan Samudra, politisi Demokrat asal Dapil Klungkung.

Perdebatan yang dinilai ada kesalahpahaman ini, ditengahi anggota Pansus LKPJ Nyoman Parta. Ketua Fraksi PDIP ini berharap anggota dewan tidak alergi kalau ada kritikan. Politisi asal Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, ini mengatakan gagasan Simantri adalah program ideal kerakyatan. Ada 502 Simantri yang terbangun di kabupaten dan kota. "Banyak yang gagal, seperti pengolahan bio gas dan bio urine tidak berjalan," ungkap Parta seraya meminta eksekutif nanti mencari pendamping atau pakarnya untuk mengolah bio gas ini.

Pada hearing dengan Gubernur Bali dan SKPD di DPRD Bali pekan lalu, Parta menyoroti Simantri di beberapa kabupaten

yang tidak mampu mengolah limbahnya seperti yang ada di program. "Enceh sampine mekutang (kencing sapinya terbang), karena mesin penyedotnya macet dan amah barak (karatan)," ujar Parta ketika itu.

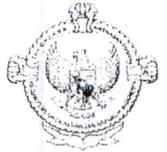
Kemarin Parta meminta supaya ada solusi atas kasus-kasus kecil namun malah berdampak pada program. "Kalau kendala selama ini bisa ditangani, jangankan 100 Simantri, 1.000 Simantri bisa dianggarkan," tegasnya.

Akhirnya Pansus LKPJ kemarin memutuskan ada evaluasi terhadap program Simantri. Terutama hal-hal mendasar tentang penangan program Simantri yang gagal.

Terkait dengan evaluasi unit Simantri secara menyeluruh, Gubernur Made Mangku Pastika menyatakan, pihaknya saat ini dalam kondisi menunggu laporan. "Saya bilang evaluasi, kalau memang tidak baik kenapa mesti dipaksakan. Tetapi kalau memang ada manfaatnya dan diperlukan oleh masyarakat ya diteruskan," ujarnya. **nat, ant**

Edisi : Rabu, 25 April 2015

Hal : 3



# Dua Profesor Diperiksa Lagi

## Terdakwa Kasus Pipanisasi Ditahan

**DENPASAR** -Setelah status kasus pengadaan lahan Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) ke tahap penyidikan, tim jaksa mulai melakukan pemeriksaan saksi. Selasa kemarin (28/4), giliran dua profesor diperiksa hingga sore hari. Mereka adalah Prof. DR. Wayan Rai dan Prof. DR. Ketut Suma.

Dari pantauan koran ini, Prof. Rai diperiksa hingga pukul 18.30 di Kejati Bali. Dua saksi ini diperiksa mulai pukul 09.00.

Sempat istirahat makan siang, lantas dilanjutkan lagi pemeriksaannya.

Dua saksi ini diperiksa Jaksa I Gede Art-hana, Jaksa Akmal Kodrat dan Subekhan. Dikonfirmasikan ke Kasipenkum Kejati Bali Ashari Kurniawan membenarkan bahwa ada pemeriksaan saksi. "Ada dua profesor yang diperiksa. Prof. Rai sama Prof. Suma. Terkait panitia pengadaan lahan," tandas Ashari.

Sekitar pukul 16.00 Prof. Suma lebih awal keluar, namun tidak mau komentar. Dia hanya mengatakan agar ditanyakan ke jaksa penyidik saja. "Silakan tanyakan ke jaksa penyidik saja," ungkapny

► **Baca Dua... Hal 31**



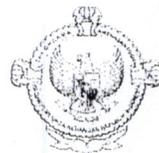
**SAMPAI  
PETANG** : Prof.  
Dr. Ketut Suma  
(kiri) dan Prof.  
Dr. Wayan  
Rai kemarin  
diperiksa lagi  
terkait kasus  
pengadaan lahan  
di Undiksha.



FOTO-FOTO: MIFTAHUDDIN/RADAR BALI

Edisi : Rabu, 29 April 2015

Hal : 21



# Gelar Perkara Kasus Hal: 31

## Pupuk Pekan Ini

### ■ DUA...

*Sambungan dari hal 21*

Sedangkan Prof. Rai keluar sudah *sandikala*, sudah petang, pukul 17.59. Dia juga tak banyak memberi penjelasan. "Saya sebenarnya hanya ditanya terkait pengadaan. Yang pertama saya jelaskan, saya dipanggil Pak Rektor untuk menjadi Tim Pengadaan. Kemudian saya dipanggil lagi yang kedua untuk dijelaskan bahwa pengadaan tanah sudah diserahkan ke pemda," ungkap Prof Rai.

Dia juga mengatakan, terkait siapa yang melakukan pengadaan lahan dia tidak tahu persis di Pemda. "Saya *nggak* tahu. Ada SK nya itu era Bupati Bagiada. Untuk yang menilai lahan ada Tim independen," imbuhnya. "Lebih jelas tanyakan ke Pemda Buleleng," imbuhnya.

"Saya memang dilibatkan, dan saya mendapatkan gaji. Tapi perlu dicatat, saya tidak pernah sama sekali dilibatkan dalam tim pen-

gadaan tanah tersebut. Walaupun secara SK nama saya tertera," sergahnya, menandakan.

Dia terkesan enggan bicara banyak terkait potensi politik internal kampus. "Kalau di internal *kayaknya* tidak ada unsur politik dalam kasus ini. Kalau di luar saya tidak tahu. Kalian yang lebih tahu," kilahnya sambil terkekeh. Kemudian berjalan, menuju mobil Toyota Alphard warna silvernya.

Seperti diketahui, kasus Undiksha kasus ini sudah ditangani Polda Bali. Sebelumnya Subdit III Reskrimsus Polda Bali kembali melakukan pemanggilan terhadap dua orang anggota Tim Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha (Undhiksa) Singaraja. Mereka yang dipanggil adalah Prof. Dr. Wayan Rai dan Ida Bagus Emaharta. Keduanya dihadirkan sebagai saksi atas dugaan adanya *mark up* tanah yang dilakukan beberapa oknum dosen dan pegawai Undiksha.

Ini terkait pembelian lah-

an tanah seluas 15 hektare di daerah Jinengdalem, Singaraja, untuk pembangunan gedung Fakultas Olahraga dan Kesehatan pada tahun 2009 lalu. Saat ditemui koran ini di Lingkungan Mapolda Bali, Prof. Dr. Wayan Rai mengatakan jika dirinya hanya ditanyakan terkait masalah kronologi pembentukan tim pengadaan tanah tersebut.

Selebihnya dia mengatakan bahwa dirinya menjawab awal pembentukan tim tersebut atas perintah Rektor Undiksha Prof. Nyoman Sudiana.

Indikasi permainannya, tanah dibeli Rp 6 juta per are, namun oleh panitia, harga tersebut diduga di-*mark up* menjadi Rp 20 juta per are. Sehingga ada indikasi negara dirugikan puluhan miliar.

Perkembangan lain kasus korupsi, yakni kasus pipanisasi di Karangasem, setelah mantan Kadis PU Karangasem I Wayan Arnawa divonis, kemarin satu tersangka lain, IB Made Oka menjalani pelimpahan tahap ke

Edisi : Rabu, 29 April 2015

Hal : 31



## Pemkab Bagikan Rp 34 Miliar

**SEMENTARA ITU**, anggaran pilbup Badung bisa jadi paling besar diantara kabupaten/kota lain yang menggelar pemilihan umum kepala daerah (pilkada). Data yang didapat koran ini, Pemkab Badung menyiapkan anggaran lebih dari Rp 34 miliar. Anggaran itu untuk menunjang kinerja KPUD, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), termasuk pengamanan dari Polresta Denpasar, Polres Badung, dan Kodim 1611/ Badung.

Jumlah dana ini, diungkapkan Kepala Badan Kesbangpolinmas Badung I Nyoman Suendi. Menurut Suendi, penggunaan dana terbesar adalah KPUD Badung. Yakni, sebesar Rp 19,6 miliar, sedangkan Panwaslu Badung sekitar Rp 5,2 miliar. "Jadi tidak perlu disangsikan lagi kesiapan kami dalam melaksanakan Pilkada Badung," tegas Suendi kemarin (28/4), dalam kegiatan pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilihan gubernur, dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2015 di Kabupaten Badung, yang diselenggarakan Bawaslu RI bekerjasama

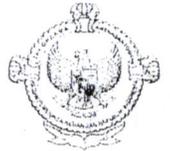
dengan Bawaslu Provinsi Bali, di Puspem Badung.

Dijelaskan lebih jauh, demi memperlancar pelaksanaan Pilbup Badung sudah ada tim analisis keamanan daerah. Pemerintah, betul-betul sudah sangat siap menyukseskan pelaksanaan Pilbup Badung. Dalam sosialisasi tersebut turut hadir Komisioner Bawaslu RI Nasrullah, Ketua DPRD Badung I Nyoman Giri Prasta, Ketua Bawaslu Provinsi Bali I Ketut Rudia, dan Ketua Panwaslu Kabupaten Badung I Ketut Arka. Sejumlah tokoh masyarakat juga tampak hadir, ormas, kalangan akademisi, parpol, serta hadir para pemilih pemula.

Komisioner Bawaslu RI Nasrullah mengingatkan akan potensi masalah dalam kampanye. Misalnya, menyangkut masalah *money politics*, penggunaan fasilitas negara, mobilisasi PNS dan perangkat desa, pemasangan alat peraga kampanye (APK) tidak sesuai dengan aturan, *black campaign*, kampanye di luar jadwal, penggunaan tempat ibadah, lembaga pendidikan dan kantor pemerintah untuk kampanye. "Potensi-potensi seperti ini harus betul-betul dicermati," pintanya. (san/djo)

Edisi : Rabu, 26 April 2015

Hal : 23



# **Polda Datangi Galian C di Kawasan Geopark**

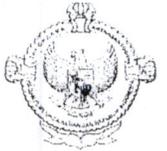
**BANGLI** - Beroperasinya kembali Galian C di kawasan Geopark Batur, pasca demo ratusan sopir truk dan pemilik lahan ke kantor Bupati Bangli, mengundang reaksi Polda Bali. Selasa (28/4) kemarin, tim dari Ditreskrimsus Polda Bali bersama Polsek Kintamani, mendatangi lokasi Galian C di wilayah Toya Mampeh. Alat berat yang ditemukan masih beroperasi aktivitasnya langsung dihentikan dan

operator bersama satu orang yang ditemukan di lokasi diamankan. Kapolsek Kintamani Kopol Dewa Mahaputra mengatakan, tim Polda Bali mendatangi dua titik galian C di Kintamani yakni di wilayah Banjar Tabu dan Toyo Mampeh. Untuk yang di Banjar Tabu tim hanya mengambil foto lokasi saja lantaran warga banyak yang datang ke lokasi. Sedangkan di wilayah Toya Mampeh

tim melakukan penutupan dan menghentikan alat berat. "Dua orang diamankan termasuk operator alat berat," ujarnya. Sementara itu Kapolres Bangli AKBP Suswanto ketika dikonfirmasi mengakui kalau tim dari Polda Bali melakukan penertiban aktivitas galian C di Kaldera Batur dan mengamankan penambang dan operator alat berat. Untuk penertiban galian C yang

disinyalir tidak memiliki izin akan dilakukan dengan terpadu serta berkoordinasi dengan Pemkab Bangli. "Untuk penegakan hukum kami dukung. Jika ilegal, harus dihentikan. Kami juga terus melakukan pendataan dan masyarakat diimbau untuk tidak merusak lingkungan," ungkapnya. Sekadar diketahui pada Sabtu (25/4) ratusan sopir pengangkut material galian

C bersama pemilik lahan penambangan *ngelurug* Kantor Bupati Bangli. Kedatangan ratusan sopir ini pun pada intinya menyatakan keberatan dengan langkah pemerintah yang menutup galian C yang selama ini menjadi penghidupan mereka. Atas kedatangan penambang tersebut, Bupati Bangli I Made Gianyar mengaku akan memediasi langsung ke gubernur Bali. (nom/gup)



# Radar Bali

**DENPASAR** - Pro dan kontra terkait rencana reklamasi Teluk Benoa terus berlangsung. Pun begitu di saat jeda isu terkini tentang moratorium. Ini setelah muncul pernyataan Tommy Winata (TW), bos Artha Graha yang menyatakan siap untuk moratorium rencana reklamasi Teluk Benoa. Juga menyebut telah menghabiskan dana Rp 1 triliun.

Sejumlah pihak pun langsung mempertanyakan untuk apa saja dana sebesar itu digelontor

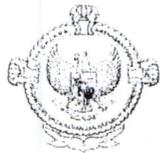
► *Baca Jalan... Hal 31*

Nama Pihak	Bentuk Dukungan	Pro dan Kontra Reklamasi
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gubernur Bali</li> <li>■ DPRD Bali</li> <li>■ Parpol</li> </ul>	<p>Menerbitkan SK reklamasi sebanyak dua kali</p> <p>Menerbitkan rekomendasi reklamasi</p> <p>Memilih diam, dan sebagian oknumnya ikut dalam demonstrasi mendukung. Sikap parpol juga terwujud dalam penerbitan rekomendasi DPRD Bali tentang reklamasi</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Presiden SBY</li> </ul>	<p>Merevisi Perpres Sarbagita dengan mengubah status kawasan Teluk Benoa dari kawasan konservasi menjadi budi daya. Juga ikut menanam mangrove bersama sejumlah menteri dan pesepak bola Ronaldo.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Menko Perekonomian Hatta R.</li> </ul>	<p>Memberikan masukan dalam Revisi Perpres Sarbagita melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Menteri Kelautan Cicip Sutardjo</li> <li>■ Tim FS</li> </ul>	<p>Menerbitkan Izin Lokasi. Dan Dirjen-dirjennya ikut membela reklamasi</p> <p>Membuat FS Unud yang awalnya menghasilkan kesimpulan bahwa reklamasi Teluk Benoa adalah layak, walau hasil review Senat Unud menjadi tidak layak. Sebagian tim FS ini berasal dari Universitas Warmadewa</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Akademisi</li> <li>■ Ormas</li> </ul>	<p>Sejumlah akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia menjadi tim review FS Unud</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Media massa</li> </ul>	<p>Diduga ikut dalam demonstrasi pro reklamasi, dan sebagian lagi mengintimidasi demonstrasi dari penolak reklamasi</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ LSM dan mantan aktivis 1998</li> </ul>	<p>Ada pro dan kontra, ada berita berbayar serta iklan atau advertorial</p> <p>Sebagian ada yang pro, sebagian ada yang kontra</p>	

GRAFIS: GT DEWANTARA/RADAR BALI

Edisi : Rabu, 29 April 2015

Hal : 21



# Enggan Komentari Gubernur NTB

## ■ JALAN...

Sambungan dari hal 21

Pasalnya, dana riil yang sudah dikeluarkan oleh PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) baru sebatas untuk membiayai *feasibility study* (FS) atau studi kelayakan yang dikerjakan tim dari LPPM Unud sebesar Rp 1 miliar. Sejak isu moratorium bergulir, reklamasi seakan jadi jeda. Meski demo pro dan kontra sempat mencuat.

"Kami ingin diungkap dana Rp 1 triliun itu untuk apa saja?" ketus I Gusti Ngurah Harta, *pinisepuh* Perguruan Kebatinan Sandi Murti kepada koran ini kemarin.

Dia mengatakan, kalau Tommy Winata sudah mengaku mengeluarkan dana sebesar itu, mestinya dibuka sekalian untuk apa dan siapa saja yang menikmati. Dan dari pihak aparat hukum, seperti Kejati Bali, mestinya tidak tinggal diam.

"Yang punya uang sudah *ngomong gitu, kok* Kejati diam?" tandasnya penuh tanya.

Ngurah Harta sendiri mengakui, sejak awal rencana reklamasi ini ramai di Bali, dia lebih memilih diam. Namun, dia berbalik menjadi penentang rencana reklamasi karena kebalikannya terusik atas pernyataan salah satu petinggi PT TWBI. Dia pun menceritakan, kala itu ada demonstrasi dari ribuan massa ForBALI di perbatasan Teluk Benoa men-

ahu. Saat itu, salah satu petinggi PT TWBI menginginkan agar menghancurkan perahu-perahu itu, dengan mengerahkan massa dari salah satu ormas di Bali. Atas pernyataan itu, Ngurah Harta pun meminta jangan menggunakan cara kekerasan seperti itu.

"Namun, dijawab dia tidak percaya dengan orang Bali. Lalu akan bawa orang dari luar Bali," tuturnya. "Sejak saat itu, saya bilang mulai hari ini saya tidak di posisi tidak bersikap. Mulai hari ini saya perang. Karena mereka telah mengutik-utik kebalian saya dengan mengatakan tidak percaya dengan orang Bali," tegasnya.

Selain persoalan itu, Ngurah Harta menegaskan bahwa dia menolak rencana reklamasi lantaran ada beberapa sebab. Di antaranya, dia menyebut reklamasi ini kalau berjalan maka akan mengakibatkan wilayah Bali selatan khususnya Badung dan Denpasar tambah padat, dan kemacetan bakal makin parah. Apalagi, pihak PT TWBI sendiri mengklaim reklamasi Teluk Benoa ini akan menciptakan lapangan pekerjaan sampai 200 ribu orang.

"Selain akan tambah macet, jelas akan meningkatkan kriminalitas. Industri seks juga akan makin ramai, dan bagi pria hidung belang itu bisa mengakibatkan HIV/AIDS. Itu per-

nyatakan reklamasi Teluk Benoa untuk memajukan pariwisata Bali. Katanya, pariwisata Bali maju bukan karena hotel. Tapi karena budaya dan tradisinya.

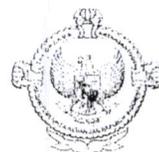
"Kalau mau majukan pariwisata, lebih baik di Madura. Agar pariwisata di sana maju," terangnya. Koordinator ForBALI Wayan "Gendo" Suardana juga mengatakan, mestinya soal pengakuan TW sudah mengeluarkan dana Rp 1 triliun itu bisa dibuka ke publik. Katanya, masalah dana Rp 1 triliun telah menimbulkan prasangka dari rakyat.

Gendo sendiri mengakui, dari awal munculnya rencana reklamasi, hingga kini, upaya dari orang-orang yang mengaku dari TWBI mencoba untuk mendekati. Tapi, sejauh ini, dia dan gerakan ForBALI selalu konsisten melakukan penolakan terhadap reklamasi.

Gendo tidak mau menuding sejumlah pihak-pihak yang pro terhadap reklamasi Teluk Benoa, lantaran sudah kena uang. Namun, dia mengakui masyarakat memiliki kearifan untuk menilai itu. Sebab, pandangan masyarakat, birokrasi di negeri ini masih korup. Dia sendiri menyayangkan, sejumlah pihak yang memiliki sumber daya untuk melaku-

Edisi : \_\_\_\_\_

Hal : \_\_\_\_\_



## Radar Bali

pihak lainnya malah mendukung. **(Beberapa pihak yang pro dan kontra bisa dilihat di grafis)**

"Saya tidak mau menyebut mereka menerima uang. Tapi, masyarakat memiliki kearifan untuk menilai. Makanya, sekarang pihak TWBI silakan jelaskan dana Rp 1 triliun itu untuk apa saja, buktikan kalau itu tidak terkait dengan perubahan Perpres, keluarnya SK gubernur, rekomendasi DPRD, gerakan demonstrasi pro reklamasi, dan lain-lain," papar dia.

Sementara itu, Dirut PT TWBI Heru Waseso buka suara terkait pengakuan TW soal dana Rp 1 triliun. Katanya, TW tidak pernah menyatakan telah mengeluarkan dana Rp 1 triliun. Namun, dia mengakui dalam pernyataan kepada pers, TW menyatakan adanya dana awal untuk proyek itu sekian persen dari dana yang disediakan sebesar Rp 30 triliun. Dana itu, katanya, hanya untuk FS, gaji, CSR, dan lainnya. "Jadi, Pak Tommy hanya mengatakan ya sekitar itu. Tapi tidak menyebutkan Rp 1 triliun," akunya.

Soal masih banyaknya penolakan baik di Bali, juga di luar Bali dalam hal lokasi pengambilan material, dia mengatakan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Soal material, dia hanya berurusan dengan penyuplai. "Soal gubernur NTB kami tidak mau berpolemik," katanya. **(yor/pit)**

Edisi : \_\_\_\_\_

Hal : \_\_\_\_\_